

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) didirikan di tahun 2006 dengan nama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP). BTIP menggunakan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pola Badan Layanan Umum (BLU). Pada 19 November 2010 berdasarkan Permen Kominfo (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika), BTIP berganti nama menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas operasional. Pada tahun 2017, BP3TI mengalami perubahan struktur organisasi dari berbasis proses menjadi berbasis *output* layanan, berfokus pada infrastruktur dan ekosistem.



Gambar 2.1 Sejarah BAKTI Komdigi
Sumber: BAKTI Komdigi

Sejak Agustus 2017, BP3TI resmi *rebranding* menjadi BAKTI untuk memperkuat publikasi dan nama instansi. Hal ini menjadi tanda babak baru dengan perubahan nama dari BP3TI menjadi BAKTI. Nama ini dipilih untuk mempermudah publikasi dan mencerminkan komitmen organisasi dalam melayani masyarakat. Perubahan tersebut diresmikan melalui Peraturan Menteri Kominfo

Nomor 3 Tahun 2018, yang juga menetapkan struktur organisasi dan tata kerja baru berbasis *output* layanan, seperti infrastruktur dan ekosistem. BAKTI sendiri, memiliki makna positif dalam bahasa Indonesia, yaitu tunduk, hormat, dan setia dalam melayani masyarakat guna pemerataan jaringan telekomunikasi dan layanan informatika di Indonesia. BAKTI bertugas dalam mengelola pendapatan dari Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) serta membangun juga mengelola infrastruktur dan layanan komunikasi teknologi informasi di Indonesia. Hal tersebut untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh wilayah negara Indonesia.



Gambar 2.2 Visi Misi BAKTI Komdigi
Sumber: BAKTI Komdigi

Visi ini menegaskan komitmen BAKTI Komdigi dalam mengurangi kesenjangan akses digital di Indonesia. Dengan menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), BAKTI Komdigi berupaya mewujudkan pemerataan dalam pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, serta mempercepat kemajuan bangsa menuju masa depan yang lebih inklusif dan kompetitif.

Misi ini menegaskan tanggung jawab BAKTI Komdigi dalam menyediakan layanan telekomunikasi dan internet secara merata melalui skema KPU/USO. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa layanan tersebut tidak hanya mencakup seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga memiliki kualitas yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat sasaran, BAKTI Komdigi berupaya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan, khususnya di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses digital.

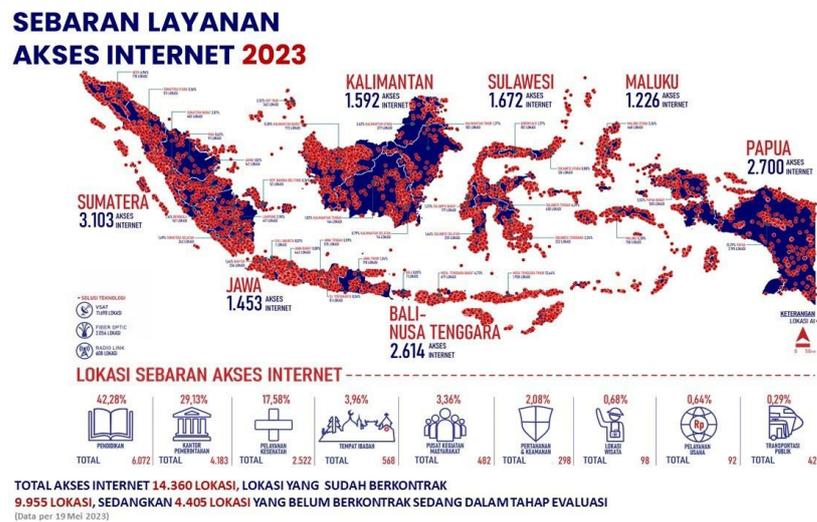
Berdasarkan *website* resmi, BAKTI Komdigi memiliki beberapa program utama. Sebagai bagian dari upaya menjembatani kesenjangan digital di Indonesia, BAKTI Komdigi menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan untuk menyediakan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Beberapa program utama yang dijalankan meliputi:

1. Akses Internet (BAKTI AKSI)

BAKTI Komdigi menjalankan program BAKTI AKSI (Akses Internet) sebagai bagian dari inisiatif Kewajiban Pelayanan Universal (USO) untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Program ini difokuskan pada penyediaan layanan internet di berbagai fasilitas publik strategis, seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta tempat umum lainnya yang membutuhkan konektivitas digital.

Dalam implementasinya, BAKTI AKSI memanfaatkan teknologi *fiber optic*, *radio link*, dan *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* agar dapat menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Khusus untuk teknologi VSAT, diperlukan lahan yang cukup untuk menempatkan antena parabola berdiameter sekitar tiga meter serta daya listrik minimal 450 watt. Selain itu, pemohon yang ingin mengajukan akses internet melalui program ini harus memenuhi persyaratan

tertentu, seperti kepemilikan perangkat komputer dan akses sinyal seluler untuk mendukung operasional layanan internet.



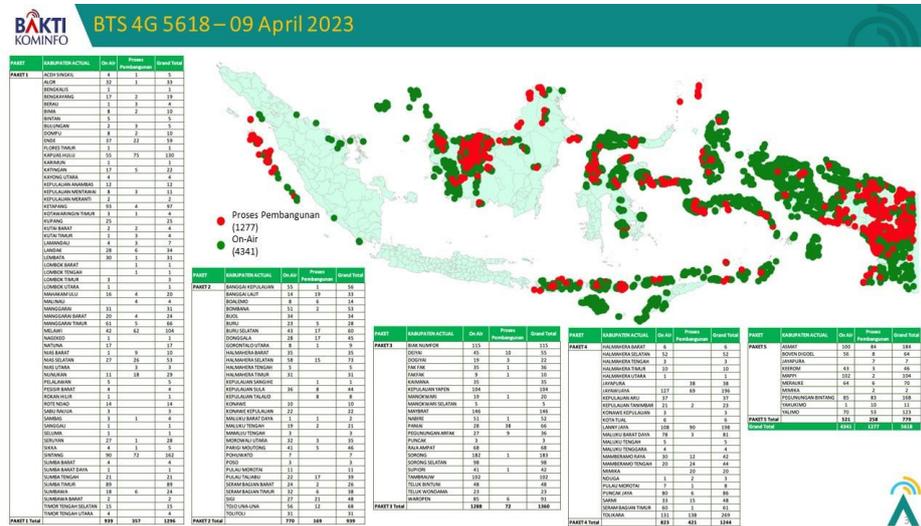
Gambar 2.3 Peta Sebaran Layanan BAKTI AKSI
 Sumber: BAKTI Komdigi

2. BTS (*Base Transceiver Station*)

Sebagai bagian dari upaya mengatasi kesenjangan digital, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) difokuskan pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta lokasi prioritas (Lokpri) yang masih mengalami blank spot atau tidak memiliki akses sinyal seluler. Keberadaan BTS ini bertujuan untuk membuka isolasi komunikasi di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses layanan telekomunikasi kini dapat menikmati konektivitas yang lebih baik.

Pembangunan BTS memerlukan lahan seluas 20x20 meter, yang digunakan untuk mendirikan menara serta perangkat pendukungnya. Sejak dimulai pada tahun 2015, proyek ini telah menghadirkan BTS dengan ketinggian 42 hingga 72 meter, yang ditopang oleh berbagai sumber daya listrik, seperti solar panel, sistem *hybrid*, dan jaringan PLN. Selain itu, untuk mendukung transmisi jaringan, BTS dilengkapi dengan teknologi seperti *microwave*, *fiber optik*, dan *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, yang

memungkinkan penyediaan layanan telekomunikasi di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional.



Gambar 2.4 Peta Sebaran Layanan BAKTI SINYAL (BTS)
Sumber: BAKTI Komdigi

3. Palapa Ring

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis serat optik yang bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini dirancang guna memperkuat konektivitas digital nasional, memastikan akses komunikasi yang lebih cepat dan stabil, serta menjangkau wilayah yang sebelumnya minim infrastruktur telekomunikasi. Dalam implementasinya, layanan yang disediakan melalui Palapa Ring mencakup penyewaan kapasitas jaringan, penyediaan *dark fiber*, serta berbagai bentuk kemitraan, seperti kemitraan internet mandiri dan kerja sama strategis lainnya. Dengan berbagai layanan ini, Palapa Ring berperan sebagai tulang punggung dalam pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia.



Gambar 2.5 Peta Sebaran Palapa Ring
Sumber: BAKTI Komdigi

4. Ekosistem Digital

BAKTI tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah menghadirkan akses internet mandiri di kawasan perdesaan serta mendorong pemanfaatan teknologi di berbagai sektor, seperti pendidikan dan ekonomi. Untuk mengoptimalkan dampak dari infrastruktur yang telah dibangun, BAKTI turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan internet secara produktif. Dengan adanya inisiatif ini, masyarakat—terutama di daerah 3T—didorong untuk meningkatkan literasi digital dan mengembangkan potensi ekonomi berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi ekonomi digital serta menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing di era digital.

5. SATRIA (Satelit Republik Indonesia)

SATRIA (Satelit Republik Indonesia) adalah proyek satelit multifungsi pemerintah yang bertujuan memperkuat akses internet di wilayah yang sulit dijangkau, khususnya daerah 3T dan perbatasan. Proyek

ini merupakan inisiatif strategis nasional yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo untuk menyediakan konektivitas digital yang inklusif dan merata.

Dengan teknologi *High Throughput Satellite (HTS)* berkapasitas 150 Gbps, SATRIA akan menjangkau 150.000 titik layanan publik, termasuk sekolah, pesantren, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, dan layanan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Proyek ini juga melengkapi infrastruktur Palapa Ring, memperkuat ekosistem digital Indonesia. SATRIA dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan skema *Availability Payment (AP)* selama 15 tahun, sesuai dengan Perpres No. 38 Tahun 2015. Kelayakan proyek dijamin oleh Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Pembangunan dimulai pada akhir 2020, bekerja sama dengan Thales Alenia Space (Prancis) sebagai manufaktur satelit dan SpaceX (AS) sebagai penyedia roket peluncur. Peluncuran dijadwalkan pada 2023, dengan 11 stasiun bumi (*gateway*) yang tersebar di Indonesia. Cikarang akan menjadi pusat kendali utama, sementara Banjarmasin menjadi pusat kendali cadangan.



Gambar 2.6 SATRIA-1
Sumber: BAKTI Komdigi

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar struktur organisasi yang diterapkan di BAKTI dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Struktur Organisasi BAKTI Komdigi
Sumber: BAKTI Komdigi

BAKTI bertanggung jawab dalam memastikan pemerataan akses telekomunikasi dan layanan informatika di Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Direktur Utama dengan Satuan Pemeriksa Intern sebagai pengawas internal. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAKTI memiliki beberapa direktorat utama:

1. Direktorat Sumber Daya dan Administrasi, yang terdiri dari Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, Hukum, serta Pengadaan dan Sistem Informasi.
2. Direktorat Keuangan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan, perbendaharaan, penyusunan anggaran dan akuntansi, serta manajemen risiko melalui koordinasi antara Penyusunan Anggaran dan Akuntansi, Manajemen Risiko, Pengelolaan Pendapatan, serta Perbendaharaan dan Investasi.

3. Direktorat Infrastruktur, yang menangani pengembangan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi. Hal tersebut memiliki Divisi Infrastruktur *Lastmile/Backhaul*, Satelit, dan Infrastruktur *Backbone*.
4. Direktorat Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika untuk Masyarakat serta Pemerintah. Direktorat terdiri dari Divisi Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Pemerintah serta Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat.
5. Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, yang mencakup Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha I serta Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha II.

